

# **Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Surakarta**

Oleh

Umi Mahmudah

Dosen Pembimbing Utama (Joko Pramono, S. Sos, M.Si)

Dosen Pembimbing Pendamping (Dra. Sri Riris Sugiyarti, M.Si)

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Ummimahmudah6884@gmail.com

## **INTISARI**

Partisipasi politik adalah salah satu indeks yang paling berpengaruh. dalam suatu spektrum negara yang berasas system kerakyatan (demokrasi). Maksudnya adalah, dikatakan negara demokrasi bilamana penguasa (pemerintah yang berkuasa) memberikan, keleluasaan yang seluas-luasnya terhadap rakyat untuk andil atau berpartisipasi dalam kegiatan berpolitik. Pada saat pelaksanaan Pilpres tahun 2019 di tingkat kota Surakarta mutlak membutuhkan partisipasi politik seluruh kalangan masyarakat termasuk juga para penyandang disabilitas. Mengingat para penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas yang kurang diperhatikan keberadaanya. Selain itu juga para penyandang disabilitaspun kurang aktif dalam berpartisipasi disetiap kegiatan pemilu yang dilaksanakan di kota Surakarta mulai dari bergabung dalam kelompok kepentingan, kegiatan kampanye serta pemberin suara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena adanya kurangnya pemahaman pendidikan politik di kalangan masyarakat terkait pentingnya partisipasi politik dikalangan penyandang disabilitas serta ketidakhadiran dari beberapa penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik.

Penulisan dari skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pilpres tahun 2019 di tingkat kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori bentuk partisipasi politik konvensional Abramson dan Hardwick. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilpres tingkat kota Surakarta tahun 2019 adalah hanya berpartisipasi politik dalam kegiatan pemberian suara. Selain itu minimnya intensitas dari partisipasi politik penyandang disabilitas dalam bergabung tim sukses atau relawan demokrasi dan mengikuti kegiatan kampanye secara langsung. Agar para penyandang disabilitas berkenan untuk mengikuti kegiatan politik hendaknya para penyelenggara pemilu memberi fasilitas khusus misalnya kursi roda disetiap TPS untuk menunjang dalam kegiatan pemilu, memberi petugas khusus untuk penjemputan para penyandang disabilitas untuk menuju TPS, agar kegiatan pemilu menjadi salah satu kegiatan yang adil untuk segala kalangan termasuk penyandang disabilitas. Jumlah DPT penyandang sebanyak 1042 dan hanya sebanyak 529 orang yang ikut berpartisipasi dalam pilpres tahun 2019 ditingkat kota Surakarta dengan keseluruhan persentase sebanyak 51%.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas.

## **ABSTRACT**

### **Political Participation of Disability in the 2019 Presidential and Vice President of Surakarta**

**By**

**Umi Mahmudah**

Political participation is one of most influential index in a spectrum of states that are based on greed or democracy. The idea is said to be a democracy where powerful rulers or governments give people as wide latitude as they can be fire or participate in political activities. At the time of the 2019 presidential election at the city level of Surakarta will need political participation as well disability candidates. Because those with disabilities are a minority that are underrated. Moreover, the share holder have been less active in participating in any electoral activity held in the city of Surakarta staring with interest groups, campaign, activities, voting. The study is held back because of a lack of understanding of social political education as a result of the importance of political participation among people with disabilities and absences from some with disabilities

The writing of this thesis was intended to provide insight into the political participation of the handicapped in the 2019 presidential election in Surakarta. The study employed qualitative descriptive research methods using the theories of forms of conventional political participation of Abramson dan Hardwick. The data in this study is obtained through interviews and documentaries.

Research shows that the political participation of those disabilities in 2019 Surakarta city presidential election was merely political participation in voting activities. In addition, the intensity of the political participation of those who have disability in successful teams or democratic volunteers and directly follow the campaign activities. In order for people with disabilities to approve of political activities, the organizers should give special facilities such as wheelchairs at each polling station to support election activities, providing special officers for picking up disability candidates to the polling station to make election activities on the most moderate activities for all those with disability. The number of disability on DPT listed for 1042 persons and only 529 of those participating in the 2019 draft at Surakarta City level with a combined percentage of 51%

Key words: political participation, disability.

# **PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA SURAKARTA**

## **(Studi Kasus Kantor Pemilihan Umum Kota Surakarta)**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum disebut sebagai bentuk dari dasar kerakyatan, dan menjadi salah satu pilar dari negara demokrasi yang butuh peran serta masyarakatnya sebagai partisipasi public. Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang menyelenggarakan pemilu, hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada ditangan rakyat di mana menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pelaku politik yang merdeka.

Partisipasi politik adalah salah satu indeks yang paling berpengaruh dalam suatu spektrum negara yang berasas system kerakyatan (demokrasi). Maksudnya adalah, dikatakan negara demokrasi bilamana penguasa (pemerintah yang berkuasa) memberikan, keleluasaan yang seluas-luasnya terhadap rakyat untuk andil atau berpartisipasi dalam kegiatan b

Seperti yang dijelaskan oleh Samuel Huntington bahwa, pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari partisipasi politik, yang diselenggarakan oleh negara yang menganut system demokrasi untuk melibatkan masyarakat dalam pemilihan pemimpin. Melalui pemilihan umum masyarakat atau para pemilih menentukan orang-orang yang mengisi suatu jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut yaitu, mulai dari Pilpres, Pilgub, serta pemilihan anggota legislative.

Masyarakat akan didaftarkan sebagai pemilih jika memenuhi syarat berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih dijelaskan pada Undang-undang Republik

Indonesia Nomor. 08 tahun 2018 Bab IV pasal 18 tentang Hak memilih adalah sebagai berikut:

1. Warga .negara.Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih pada saat hari pemungutan suara/sudah pernah menikah atau telah memiliki hak suara.
2. Warga Negara Indonesia seperti halnya yang di maksud pada ayat 1 (satu), yang telah didaftarkan satu kali oleh panitia penyelenggaraan pemilu sebagai dafrat pemilih.

Pada saat Pilpres di Seluruh Indonesia tidak terkecuali Surakarta baik saat berlangsungnya

Secara umum penyandang disabilitas mempunyai hak dalam pemilu yaitu meliputi: hak untuk mendapatkan informasi berkaitan tentang pemilu, hak untuk didaftarkan.guna memberikan hak suara, dan ha katas akses ketempat pemungutan suara (TPS).

Pentingnya partisipasi politik bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum.merupakan.implementasi hak-hak.politik bagi penyandang disabilitas.yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pemilih.yang.lain, maka sudah selayaknya pihak penyelenggara pemilu juga memberikan perlakuan atau hak yang khusus bagi para penyandang disabilitas. Ketidakseimbangan dan kesenjangan terhadap penyandang disabilitas akan menyebabkan perbedaan persepsi mereka sendiri terhadap pelaksanaan pemilu.

Dari data KPU jumlah penyandang disabilitas yang tercatat dalam DPT yaitu sebanyak 1.042 jiwa diantaranya hanya 50% yang berpartisipasi dalam pemilu, mayoritas penyandang disabel yang tidak berpartisipasi tersebut yaitu tunanetra yang menduduki jumlah terbanyak yaitu 30% dibandingkan pada penyandang yang lainnya. Dalam pernyataan Pak Setyo Hadiarto bidang teknis dan Humas, penyandang disabelitas di kalangan tunanetra menduduki tingkat terbanyak yang tidak ikut

serta dalam partisipasi pemilu 2019, masalah tersebut dikarenakan tidak adanya penjemputan bagi kalangan penyandang tuna netra sehingga hal tersebut berdampak pada ketidakkeahdarannya para penyandang tuna netra untuk berpartisipasi dalam pemilu, alasan yang lain juga karena pihak keluargapun enggan mengantarkan ke TPS dengan alasan tidak ingin terbebani dan kurangnya pemahaman pendidikan politik di kalangan masyarakat terkait pentingnya partisipasi politik dikalangan penyandang disabilitas. Dari Pihak KPU sendiri tidak adanya anggaran untuk antar jemput bagi kalangan tunanetra untuk memuju ke TPS. Dan alasan yang mendasari para kalangan tunanetra lebih memilih untuk tidak ikut serta dalam pemilu juga di sebabkan oleh tidak hafalnya jalan menuju TPS, lain halnya dengan jalan balai kota yang sudah biasa di lalui para penyandang disabel khususnya penyandang tunanetra. Masalah penyandang disabilitas yang lain yaitu kerap kali mendapati kendala dalam berpartisipasi diproses pemilu yaitu, mulai .kesulitan.secara.fisik mengakses. TPS, hingga diskriminasi langsung dan pelantaran maka perlu adanya pendamping untuk penyandang disabelitas dalam pemilu. Seperti dalam peraturan KPU dijelaskan pemilih disabilitas boleh menentukan pendamping untuk membantu proses pemungutan suara atau menunjuk petugas panitia penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS untuk memberikan bantuan.

Setiap kehidupan bernegara warga negara mempunyai hak untuk turut aktif dalam dunia politik demikian pula penyandang disabilitas. KPU sebagai penyelenggara.pemilu.berhak menjamin setiap hak warga negara (masyarakat) untuk menentukan pilihan mereka secara langsung pemangku dan penguasa (pemimpin) yang mereka .hendaki. untuk mencapai hal tersebut, maka seluruh tahapan pelaksanaan pemilu hendaknya aksesibel bagi semua kalangan pemilih tidak terkecuali para penyandang

disabilitas. Kembali kepada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serentak pada tahun 2019 lalu, yang diikuti oleh dua pasang calon yaitu pasangan Joko Widodo/Ma'ruf Amin dengan nomor urut 01 dan pasangan Prabowo Subianto/Sandiaga Uno dengan nomor urut 02, pemilihan ini ,dimenangkan oleh nomor urut 01, namun dibalik kesuksesan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak terlepas dari partisipasi dari semua kalangan termasuk kalangan disabelitas.

Jumlah penyandang disabelitas Kota Surakarta perkecamatan adalah sebagai berikut, Kecamatan Banjarsari berjumlah 342 jiwa, Kecamatan Jebres berjumlah 311 jiwa, Kecamatan Pasar Kliwon 83 jiwa, Kecamatan Serengan Berjumlah 117 jiwa, dan Kecamatan Laweyan berjumlah 190 jiwa. Berikut ini table daftar Daftar Pemilih Tetap penyandang disabilitas kota Surakarta tahun 2019.

Table 1.2

Jumlah DPT Penyandang Disabilitas Kota Surakarta Perkecamatan Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JENIS DISABELITAS					TOTAL
		TUNA DAKSA	TUNA NETRA	TUNA RUNGU	TUNA GRAHITA	TUNA LAINYA	
1	BANJARSARI	94	34	67	79	68	342
2	JEBRES	89	44	60	55	62	310
3	PASAR KLIWON	17	25	16	4	21	83
4	SERENGAN	36	10	14	34	23	117
5	LAWEYAN	47	24	25	43	51	190
	<b>JUMLAH PERKECAMATAN</b>	<b>283</b>	<b>137</b>	<b>182</b>	<b>215</b>	<b>225</b>	<b>TOTAL 1042</b>

Sumber: Data Pemilih Tetap Pemilu 2019 Kota Surakarta, KPU Surakarta.

Dilihat dari table 1.2 tentang Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum 2019 yang dilakukan oleh KPU kota Surakarta dari lima kecamatan berjumlah keseluruhan penyandang disabilitas kota Surakarta adalah sebanyak 1042 jiwa.

Untuk jumlah penyandang disabilitas tertinggi diduduki pada kecamatan Banjarsari dan Jebres. Kecamatan Banjarsari yaitu sebesar 342, dan kecamatan Jebres yaitu sebesar 310 jiwa. Dan untuk jumlah sedang penyandang disabilitas di duduki pada kecamatan Laweyan dan Serengan. Kecamatan Laweyan yaitu sebesar 190 jiwa dan untuk Kecamatan Serengan yaitu sebesar 117 jiwa. Sedangkan Kecamatan Pasar Kliwon menduduki jumlah penyandang disabilitas paling sedikit yaitu sebesar 83 jiwa.

## **METODE MENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian mengenai Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Surakarta dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian diskripsi.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian tentang partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kota Surakarta dikarenakan fakta atau hambatan dan kendala Serta hasil penelitian ini nantinya akan lebih mudah dianalisis dengan cara Penggambaran secara mendalam dan kemudian dapat disimpulkan untuk menjawab persoalan tentang partisipasi politik penyandang disabilitas pada saat Pilpres tahun 2019 di tingkat kota Surakarta. Menurut Sugiyono penelitian diskriptif merupakan penelitian yang memiliki fungsi dalam memberikan gambaran pada objek yang akan diteliti menggunakan sampel dan populasi yang ada dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

### **B. Lokasi/ Objek Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Surakarta tepatnya di Kantor Pemilihan Umum (KPU) Surakarta. Alasan mengapa peneliti melakukan penelitian di lokasi penelitian tersebut, karena sepanjang pengetahuan peneliti

sangat jarang dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti partisipasi politik penyandang disabilitas Kota Surakarta dalam pemilihan Presiden di Kota Surakarta tahun 2019.

### **C. Teknik Penentuan Informan**

Menurut Sugiyono (2015: 61), Snowbal sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini digunakan untuk memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Ibu Mantrini Indri Hapsari selaku Subag keuangan, umum dan logistic kemudian wawancara dilimpahkan kepada bapak Setyo Budiarto Selaku bagian teknis dan humas KPU kota Surakarta (priode 2019)

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan secara bersamaan, dimana masing-masing teknik berkaitan satu sama lain teknik itu sebagai berikut:

#### **a. Studi lapangan**

##### **1) Wawancara**

Wawancara dilakukan secara struktur dengan membatasi pertanyaan yang sebelumnya telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis untuk dijawab oleh informan, sehingga apa yang ditanyakan Dalam proses wawancara agar lebih fokus dengan tujuan penelitian.

##### **2) Dokumentasi**

Dokumentasi yang digunakan peneliti dengan melihat situasi dan keadaan di tempat

penelitian, mengcopy buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, serta foto atau gambar yang digunakan untuk penunjang penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa/kejadian yang sudah terjadi. Dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.

#### a. Studi Pustaka

Peneliti menggunakan studi pustaka dengan mencari berbagai data sebagai pendukung dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan:

##### 1) Referensi buku

Referensi buku merupakan suatu tulisan ilmiah dalam bentuk substansi yang pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu. Peneliti menggunakan referensi buku yaitu sebagai bahan penunjang sebuah argumentasi yang diteliti atau teori yang diajukan dalam penelitian. Digunakan Teknik ini yaitu bertujuan agar tidak menjadi suatu tindakan plagiat atas hasil karya orang lain.

##### 2) Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan studi pustaka dengan melihat hasil-hasil dari karya ilmiah para peneliti terdahulu, disamping itu peneliti mengutip dari beberapa pendapat untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya juga sebagai data pendukung peneliti. Setidaknya ada empat penelitian terdahulu yang menjadi acuan atau contoh dalam pembuatan skripsi ini.

##### 3) Internet searching

Burhan Bungin penelusuran data merupakan tata cara untuk melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya Untuk menyediakan fasilitas online, Sehingga memudahkan peneliti dapat menggunakan data informasi online yang berupa data ataupun

informasi teori. Terutama pada jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pemilu, partisipasi, peran dan pemilih pemula. (Bungin, 2008: 148)

#### E. Validitas dan Reliabilitas Data

Teknik keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Sugiyono menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data data dan sumber data yang telah ada ada. Saat penelitian dilakukan pengumpulan data dengan triangulasi maka sebenarnya penelitian mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yang mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2012: 327).

Pengumpulan data dan sumber data dalam penelitian ini yang diperoleh peneliti, antara data satu dengan yang lain dikroscek atau diuji dan dilengkapi satu sama lain agar validitas data yang ditulis dapat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif di Kantor Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan, observasi, selama pelaksanaan penelitian di lapangan dan setelah selesai penelitian di lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis

data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:

### C. Pembahasan atau Diskusi

Partisipasi politik dari seluruh kalangan menjadi hal penting dari terciptanya pemilu yang adil bagi seluruh rakyat, begitu pula bagi penyandang disabilitas. Menciptakan pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas dapat meningkatkan partisipasi politik pada pemilu. Oleh karena itu harus adanya aksesibilitas yang menunjang para pemilih penyandang disabilitas agar mempermudah/ meningkatkan minat mereka ikut berpartisipasi politik.

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilpres tahun 2019 di tingkat kota Surakarta (studi kasus Kantor KPU Surakarta). Penelitian guna untuk mengetahui bagai mana tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu Presiden tahun 2019 yang telah dilaksanakan KPU pada tanggal 17 april 2019 di kota Surakarta.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat dilakukan analisis menurut teori bentuk partisipasi konvensional menurut Abramson dan Hardwick dengan tiga indikator yaitu:

#### a. Membentuk/ Bergabung Dengan Kelompok Kepentingan

Berdasarkan pemaparan pada hasil penelitian ini, pelaksanaan partisipasi politik dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 di tingkat kota Surakarta yang diselenggarakan oleh KPU tidak terlepas dari para penyandang disabilitas.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak KPU dalam meningkatkan partisipasi

politik pada kalangan penyandang disabilitas diantaranya bergabung dalam kelompok kepentingan seperti mengadakan sosialisasi yang berupa pemberian pemahaman terkait pemilu, simulasi atau tatacara pencoblosan yang diikuti oleh para penyandang disabilitas, pendaftaran relasi atau relawan demokrasi yang diikuti oleh penyandang disabilitas pemberian templet pada surat suara format sesuai isi surat suara kepada penyandang tuna netra .

Ada beberapa factor yang mempengaruhi mengapa ada sebagian penyandang disabilitas tidak mengikuti kegiatan politik misalnya membentuk atau bergabung dalam kelompok kepentingan tertentu, disebabkan karena adanya rasa tidak percaya diri dalam diri penyandang disabilitas karena ketidaksempurnaan mereka.

Tujuan adanya rangkaian sosialisasi tersebut adalah untuk meningkatkan partisipasi politik dikalangan penyandang disabilitas dalam pemilu presiden. Tujuan diadakan relawan demokrasi yang diwakilkan oleh salah satu penyandang tersebut yaitu untuk menghapus persepsi buruk dikalangan masyarakat terhadap pemilih yang berkebutuhan khusus dan memberi dorongan bagi penyandang disabilitas untuk memicu mereka dalam ikut serta kegiatan pemilu dengan adanya perwakilan dari mereka yang mewakili keadaan mereka sebagai penyandang disabilitas .

#### b. Kegiatan Kampanye

Berdasarkan paparan diatas para penyandang disabilitas lebih mengikuti kegiatan kampanye yang ditayangkan dimedia massa seperti televisi, sedangkan kebanyakan dari mereka tidak mengikuti kampanye yang diadakan secara langsung karena dengan alasan keterblakangan fisik mereka. Walaupun banyak kalangan dari penyandang disabilitas yang tidak mengikuti kampanye secara langsung kesadaran akan memahami visi misi para calon penguasa

itu sangatlah penting meskipun hanya via siaran ditelevisi.

#### c. Pemberian Suara

51% dari 1042 jiwa penyandang lebih memilih untuk menggunakan hak suaranya pada Pilpres 2019 di tingkat kota Surakarta. Ada berbagai factor yang mempengaruhi kenapa penyandang disabilitas enggan menggunakan hak suaranya yaitu dengan alasan mereka tidak percaya diri dengan keadaan mereka dan kurangnya pendidikan politik di kalangan penyandang disabilitas serta sikap apatis terhadap pemerintah sehingga ada beberapa penyandang disabilitas yang tidak ikut serta dalam Pilpres 2019 dari data lapangan yang penulis dapat ada beberapa data dalam DPT yang tidak valid diantaranya ada data penyandang cacat yang sudah meninggal namun masih tercatat dalam data DPT, dan ada data penyandang yang tidak diketahui keberadaan atau dinyatakan hilang oleh keluarganya bahkan sudah beberapa tahun lamanya juga masih tercatat di data DPT dan juga sudah tidak berada dalam alamat yang tertera dalam data DPT

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan hasil penelitian pada bab pembahasan dapat disimpulkan bahwa KPU Surakarta sudah berupaya dalam meningkatkan partisipasi politik dikalangan penyandang disabilitas dalam pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2019 ada beberapa rangkaian dalam upaya tersebut seperti menciptakan pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas, sosialisai berupa memberikan pemahan perihal pemilu, simulasi tata cara pencoblosan yang baik dan benar, berkerja sama dengan para relawan demokrasi, masyarakat setempat RT/RW , Bawaslu, PPS dan KPPS.

Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden tahun 2019 di Kota Surakarta cukup rendah yakni hanya setengah (51%) dari keseluruhan jumlah data DPT penyandang disabilitas (1042 jiwa). Dapat dilihat dari analisis dengan menggunakan jenis partisipasi konsensional menurut Abramson dan Hardwick yang terbagi menjadi tiga indikator yaitu, bergabung atau membentuk kelompok kepentingan, kegiatan kampanye dan pemberian suara yang disimpulkan dibawah ini:

#### 1. Membentuk / Bergabung dengan Kelompok Kepentingan

Menurut data lapangan yang penulis dapatkan menurut kesimpulan isi pembahasan minimnya intensitas dari partisipasi politik penyandang disabilitas dalam mengikuti sosialisai serta bergabung dalam relawan demokrasi ataupun bergabung dalam tim sukses dari para calon presiden, walaupun beberapa dari mereka masih ada yang ingin masuk atau bergabung dalam kegiatan tersebut namun sebagian besar dari mereka enggan untuk melakukan hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan banyak penyandang disabilitas yang kurang percaya diri dalam mengikuti kegiatan politik seperti bergabung dalam kelompok kepentingan.

#### 2. Kegiatan Kampanye

Minimnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam mengikuti kegiatan kampanye secara langsung yang dilaksanakan oleh para calon presiden dan wakil presiden di tingkat kota Surakarta tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan mereka ditambah minimnya kesadaran politik dikalangan penyandang disabilitas bahwa pentingnya ikut kegiatan kampanye dalam rangka ikut meramaikan pesta demokrasi, bagi mereka memberikan hak suara mereka itu sudah lebih dari cukup. Namun mereka tetap mengikuti kampanye yang disiarkan dalam media masa seperti televisi untuk tetap memantau atau

mengetahui visi misi para calon pemimpin yang hendak mereka pilih.

### 3. Pemberian Suara

Penyandang disabilitas lebih cenderung memilih pemberian suara dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2019 dari pada bergabung kepada kelompok kepentingan dan kegiatan kampanye hal tersebut karena ada factor yang mempengaruhi seperti kesulitan secara fisik yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam menuju TPS, tidak ada penjemputan bagi para penyandang disabilitas dalam menuju TPS, kurangnya rasa percaya diri disebabkan karena keterbatasan fisik mereka serta kurangnya pemahaman politik dikalangan masyarakat maupun kalangan penyandang disabilitas. Dari 5 Kecamatan yang tersebar di kota Surakarta keseluruhan jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT sebanyak 1042 dan hanya sebanyak 529 Dari mereka yang ikut berpartisipasi dalam pilpres tahun 2019 di tingkat kota Surakarta dengan keseluruhan persentase sebanyak 51%.

### DAFTAR PUSTAKA

Alatas, Alwi. al-Fatih Sang Penakluk Konstantinopel. (Jakarta: 2005)

Almond, Gabriel. 1956. Comperative Political System. <http://www.jstor.org>

Budiarjo, Miriam (2005). Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Guntoro. Budi, Nunung Prajarto dan Totok Wahyu Abadi (2014) "Performance E-Government untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo" Jurnal, Fakultas Pertanian, Universitas Gaja Mada.

Inu Kencana Syafie, Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Jajal, Fasli dan Dedi Supriyadi, 2001, Revormasi Penidikan Dalam Konteks Otonom Daerah, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

jurnal (Andrius:2013;26)

Maran, Rafael Raga. 2007. Pengantar Sosisologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta.

Miles dan Huberman, 2014. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas

Indonesia Press.

Parwito. 2019. Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan. Yogyakarta: pustaka Pelajar

Samuel. P Huntington. "Partisipasi Politik di Negara Berkembang". Jakarta: Rineka Cipta.

Sondang P, Sigian. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakart: Bumi Aksara.

Sugiyono.2013." Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatifdan R&D". Bandung.

Sugiyono, 2004. Metodologi penelitian. Bandung Alfabeta.

Sugiyono, 2005. Memahami penelitian kualitatif. Bandung Alfabeta

Sugiyono, 2008. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung

ALFABET.

Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo

Sumaryadi , I Nyoman, 2010, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penererbit Citra Utama